

PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI PAPUA TENGAH

**Suryadi¹, Hans F. Liborang², Hemanus J. Suripatty³,
Wardhana W. Dharsono⁴, Watrisno⁵**

^{1,3,5}. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Satya Wiyata Mandala

². Program Studi Agribisnis, Universitas Satya Wiyata Mandala

⁴. Program Studi Teknik Industri, Universitas Satya Wiyata Mandala

Email:

suryadi.uswim@gmail.com¹, fritsliborang@gmail.com², hj_suripatty@gmail.com³,
wardhana.wd@gmail.com⁴, trisnbnx@gmail.com⁵

ABSTRAK

Website digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat memang menjadi keharusan pemerintah dalam era digital, Website berperan penting sebagai media pemerintah untuk melakukan diseminasi informasi publik. Berdasarkan hal itu, maka Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupaya untuk memberikan sedikit kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah khususnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait dengan pelatihan dan pendampingan pengenalan website. Pelaksanaan PkM dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan, verifikasi, pemberian materi, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan serta evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil pengamatan setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa transfer skill dan pengetahuan mengenai website kepada pegawai DPMPTSP Provinsi Papua telah berhasil.

Kata Kunci : Website, DPMPTSP, PkM, Papua Tengah

ABSTRACT

The website is used as a means to bring public services closer to the community is indeed a must for the government in the digital era, the website plays an important role as a government media to disseminate public information. Based on this, this PkM seeks to make a small contribution to the Central Papua Provincial Government, especially the One-Stop Investment and Integrated Service Office (DPMPTSP) related to training and assistance in website introduction. The implementation of PkM starts from the stages of problem identification, verification, provision of material, implementation of training and mentoring and evaluation of activities. Based on observations after the implementation of training and mentoring, it can be concluded that the transfer of skills and knowledge about the website to DPMPTSP employees of Papua Province has been successful.

Keywords: Website, DPMPTSP, PkM, Central Papua

PENDAHULUAN

Website, mampu menyediakan medium bagi “transaksi” antara penyuplai dan pengguna informasi dengan cara yang mudah namun juga akurat. Pada sektor privat, penggunaan website sebagai medium untuk menyebarluaskan informasi terkait bisnis serta produk dan jasa yang ditawarkan merupakan hal yang vital bagi kesuksesan suatu brand, misalnya sebagai medium promosi (Ayuningtyas et al., 2020; Djoni et al., 2021). Selain itu keberadaan suatu website dalam hubungannya sebagai instrumen penghubung serta medium bagi penyebaran informasi merupakan suatu keniscayaan dalam era digital saat ini. Dengan perkembangan *Information and Communcation Technology* (ICT) yang sangat pesat maka arus informasi bisa datang dari sumber mana saja. Dari sisi “demand” kebutuhan akan informasi yang akurat dan cepat juga semakin tinggi. Untuk itulah maka website berperan sangat penting bagi kehidupan manusia modern. Begitu pula dengan sektor publik dimana pemerintah saat ini dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat modern sebagaimana tuntutan yang sama pada sektor privat. Dalam konteks ini, website berperan sebagai saluran resmi pemerintah untuk mendiseminasikan segala kebijakan atau informasi publik lain yang bersifat resmi. Untuk itulah keberadaan website resmi pemerintah merupakan hal yang sangat diperlukan dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Berkaitan dengan penggunaan website sebagai saluran resmi pemerintah untuk “bertemu” dengan masyarakat, maka fenomena ini dalam studi Administrasi Publik serta Ilmu Riki Afriansyah. (2020). Analisis Peluang Transformasi “E-Government” menjadi “E-Democracy” melalui Website Resmi Pemerintah Daerah. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 103. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1201> Schuppan, T. (2009). *E-Government in developing countries: Experiences from sub-Saharan Africa. Government Information Quarterly*, 26(1), 118–127. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.01.006>.

Di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah (DPMPTSPPT), Website ini dimaksudkan sebagai sarana publikasi untuk memberikan informasi dan gambaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dewasa ini menuntut OPD untuk aktif dalam menyajikan informasi, dan sudah merupakan keharusan di Era ini. Website ini dibangun sebagai sarana informasi yang didalamnya memuat segala aktifitas yang dilakukan di DPMPTSP serta jenis dan persyaratan perizinan juga terkait dengan Informasi Program Gubernur, Motto, Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, dan berita-berita terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Seperti yang telah dilakukan untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi, Provinsi Papua Tengah harus mendorong berbagai investasi, termasuk investasi yang difasilitasi, investasi yang difasilitasi, investasi dalam negeri dan investasi pemerintah. Investasi sektor swasta harus dikembangkan karena investasi pemerintah sangat terbatas dan hanya pada sektor nirlaba dimana sektor swasta tidak tertarik, seperti penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) publik. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal untuk mengisi pasar tenaga kerja lokal akan dilakukan secara simultan agar kegiatan investasi Provinsi Papua Tengah benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Dasar Hukum pelaksanaan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu secara garis besar adalah : Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan diatas maka, DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala Daerah /Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan menyelenggarakan fungsi antara lain : 1.Penyusunan dan perumusan Kebijakan dibidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan dibidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3.Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Pelaksanaan Administrasi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5.Pelaksanaan fungsi lain oleh Gubernur dibidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

METODE

Pelaksanaan PkM ini merupakan kegiatan bersama antara USWIM dan DPMPTSP Provinsi Papua Tengah . Kontinuitas pelaksanaan PkM ini sedikit banyak memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada pada DPMPTSP Provinsi Papua Tengah terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan dan pelayanan publik. Berbekal dari pengetahuan dan pengalaman , maka tim PkMbisa mengidentifikasi bahwa masih terdapat kelemahan dalam bidang sumberdaya manusia. Pada PkM tim membantu DPMPTSP dalam pemahaman dan tim PkM kembali membantu DPMPTSP Provinsi Papua Tengah dalam hal operasional dan pemahaman website <https://dpmptsp.papuatengahprov.go.id/> . Tujuan pengenalan dalam operasional website ini adalah untuk menjaga dan memastikan bahwa website “<https://dpmptsp.papuatengahprov.go.id/> ” yang dikembangkan oleh DPMPTSP Provinsi Papua Tengah sesuai dengan panduan dan memenuhi syarat-syarat sebagai website pemerintah yang bisa di akses oleh publik luas. Secara singkat, tahapan PkM kali ini akan memuat langkah-langkah sebagai berikut :

1.Identifikasi permasalahan

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, berangkat pada pengalaman pelaksanaan PkM dalam kegiatan sebelumnya, maka tim PkM bisa mengidentifikasi kelemahan kemampuan sumberdaya manusia dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan dan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini maka kemampuan yang kurang dalam operasional website menjadi tema yang akan diberikan pelatihan dan pendampingan.

2. Verifikasi permasalahan

Meski tim sudah bisa mengidentifikasi permasalahan, namun diperlukan adanya verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepala DPMPSTSP Provinsi Papua Tengah Bapak Ir. Syahrial, M.M.,

3. Diseminasi informasi

Pada tahapan ini tim melakukan transfer pengetahuan mengenai operasional website. Diskusi dan presentasi materi dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dasar evaluasi website, tools yang ada di website, serta cara membaca hasil evaluasi tersebut.

4. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pengetahuan dan pengenalan website

Pada tahapan ini tim melakukan pelatihan penggunaan website beserta langkah-langkah operasional. Setelah itu tim akan melatih dan mendampingi operator website <https://dpmpstsp.papuatengahprov.go.id/> untuk mengoperasikan web tersebut.

5. Evaluasi pelaksanaan

Pada tahapan terakhir dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan, hal ini meliputi pengujian dan verifikasi terkait dengan transfer pengetahuan yang diberikan serta pelatihan penggunaan website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian tahapan PkM dimulai dengan proses identifikasi dan verifikasi permasalahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kelemahan dan kekurangan skill serta pengetahuan mengenai proses operasional dan penggunaan website menjadi fokus pengabdian kali ini. Setelah permasalahan ini diverifikasi melalui keterangan Kepala DPMPSTSP Provinsi Papua Tengah Bapak Ir. Syahrial, M.M., serta melalui observasi langsung, maka tim mulai menyusun beberapa materi dan bahan-bahan yang terkait dengan dasar-dasar operasional dan pengenalan website dan penggunaan tools untuk melakukan pendampingan pengenalan dan operasional Website.



Gambar 1. Pengarahan Kepala DPMPSTSP Provinsi Papua Tengah Bapak Ir. Syahrial, M.M

Penyampaian Materi Website Bahan materi diseminasi informasi mengenai dasar-dasar operasional website diperoleh melalui studi kepustakaan serta beberapa tulisan dan riset yang pernah dilakukan oleh tim pengabdian. Pada tahapan ini tujuan utama tim adalah untuk memberikan pemahaman kepada operator website secara khusus serta kepada seluruh staf DPMPSTSP Provinsi Papua Tengah lain yang hadir pada kegiatan pengabdian ini mengenai pentingnya penggunaan website. Performa website yang paling penting adalah

aksesibilitas serta isi dan substansi konten yang dimuat di dalam website tersebut. Terlebih lagi mengingat bahwa website <https://dpmptsp.papuatengahprov.go.id/> merupakan website yang dikembangkan dan didanai melalui dana publik, maka sudah menjadi kewajiban pihak pengelola website untuk menjadikannya mudah diakses oleh semua pihak, dengan kata lain memastikan bahwa aksesibilitas website tersebut tinggi. Selain itu harus dipastikan juga bahwa isi konten atau informasi yang terkandung di dalam website tersebut mudah untuk dimengerti oleh masyarakat luas.



Gambar 2. Pemberian materi terkait tujuan penggunaan Website

Setelah membahas mengenai pengantar penggunaan website serta alasan mengapa diperlukan evaluasi berkala terhadap performa website, khususnya website yang didanai oleh publik, selanjutnya tim beralih kepada pembahasan mengenai beberapa cara serta instrumen untuk melakukan pengujian performa website. Materi mengenai beragam cara Operasional dan pengetahuan website diambil dari penelitian tim pengabdian yang dipublikasikan pada *International Journal of Information Science and Management* (Irawan & Hidayat, 2022). Secara komprehensif, diulas mengenai beragam cara serta instrumen pengujian performa website sebagaimana terdapat dalam literatur e-government (Gharibeni et al., 2015; Ismail & Kuppusamy, 2019; Karkin & Janssen, 2014; Sherafat & Davoodi, 2018; Verkijika & De Wet, 2018).



Gambar 3. Pemberian materi penggunaan Website

Dari beragam cara serta instrumen pengujian performa website yang tersedia dalam literatur, tim pengabdian memilih untuk fokus pada pengenalan dan pelatihan tersebut.

KESIMPULAN

Menjadi keharusan pemerintah dalam era digital ini dalam penggunaan website sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Website berperan penting sebagai medium bagi pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi dan sekaligus juga sebagai sarana bagi pemerintah untuk melakukan diseminasi informasi publik. Sudah sewajarnya website pemerintah yang dibangun dan didanai melalui dana publik harus bisa menjangkau semua

lapisan masyarakat serta memiliki performa yang baik. Berdasarkan hal itu, maka PkM kali ini berupaya untuk memberikan sedikit kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah khususnya DPMPTSP Provinsi Papua Tengah terkait dengan pelatihan dan pendampingan operasional dan pengenalan website. Pelaksanaan PkM dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan, verifikasi, pemberian materi, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan serta evaluasi kegiatan. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan operasional dan pengenalan website terhadap operator website dan staf dimaksudkan untuk melakukan transfer skill dan pengetahuan khususnya terkait dengan evaluasi website yang berguna bagi peningkatan performa website pemerintah. Berdasarkan hasil pengamatan setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa transfer pengetahuan mengenai evaluasi website kepada operator website DPMPTSP Provinsi Papua Tengah telah berhasil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Rektor dan Kepala LPPM Universitas Satya Wiyata Mandala dan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah yang telah berkenan untuk memberikan pendanaan bagi PkM kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbozo, E. (2018). Evaluating Metropolitan Assembly Web Sites in Ghana : Accessibility , Compatibility and Usability. 15 (1).
- Aladwani, A. M. (2016). Corruption as a source of e-Government projects failure in developing countries: A theoretical exposition. *International Journal of Information Management*, 36(1), 105–112. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.10.005>
- Alismail, S., & Chipidza, W. (2021). Accessibility evaluation of COVID-19 vaccine registration websites across the United States. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 28(9), 1990 –1995. <https://doi.org/10.1093/JAMIA /OCAB105>
- Aprilia, S., Wijaya, A., & Suryadi, S. (2014). Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(3), 126–135. <https://doi.org/10.21776 /ub.wacana.2014.017.03.3>
- Ayuningtyas, A., Yuliani Indrianingsih, & Uyuunul Mauidzoh. (2020). Pengenalan, Optimalisasi Optimalisasi Pengenalan Produk Unggulan Desa Melalui Pelatihan Website Promosi Kecamatan Patuk Gunungkidul. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 490–495. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i3.3782>
- Choi, H., Park, M. J., Rho, J. J., & Zo, H. (2014). Rethinking the assessment of e-government implementation in developing countries from the perspective of the design –reality gap: Applications in the Indonesian e-procurement system. *Telecommunications Policy*, 40(7), 644–660. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.03.002>
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), 151–164.

- Djoni, Yunis, R., & Ariwibowo, S. (2021). Penguatan Promosi Melalui Media Website pada Hotel Alvina Pematangsiantar. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 772–782. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.6287>
- Effendi, P. M., & Susanto, T. D. (2019). Test of citizens' physical and cognitive on Indonesian e-government website design. *Procedia Computer Science*, 161, 333–340. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.131>
- Elkadi, H. (2013). Success and failure factors for e-government projects: A case from Egypt. *Egyptian Informatics Journal*, 14(2), 165–173. <https://doi.org/10.1016/j.eij.2013.06.002>
- Elling, S., Lentz, L., de Jong, M., & van den Bergh, H. (2012). Measuring the quality of governmental websites in a controlled versus an online setting with the "Website Evaluation Questionnaire." *Government Information Quarterly*, 29(3), 383–393. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.11.004>
- Gharibeniazi, M., Kamran, M. K. A., & Ghaebi, A. (2015). Iranian state university websites. *International Journal of Information Science and Management*, 13(1), 71–85.
- Guijarro, L. (2007). Interoperability frameworks and enterprise architectures in e-government initiatives in Europe and the United States. *Government Information Quarterly*, 24(1), 89–101. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.05.003>
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2020). Evaluasi aksesibilitas website covid19.kaltimprov.go.id menggunakan sortsie 5.3.5. *Jurnal Paradigma*, 9(2), 119–130. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52239/jp.v9i2>
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2021). Asistensi Pembuatan Website "Mall Pelayanan Publik" Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 1120–1128. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i5.7766>
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2022). Evaluating Local Government Website Using a Synthetic Website Evaluation Model. 20(1), 449–470.
- Irawan, B., Hidayat, M. N., Akbar, P., & Khanz, A. H. (2020). Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda. *Matra Pembaruan*, (2), 135–145. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.135-145>
- Ismail, A., & Kuppusamy, K. S. (2019). Web accessibility investigation and identification of major issues of higher education websites with statistical measures: A case study of college websites. *Journal of King Saud University -Computer and Information Sciences*, xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.03.011>
- Kanter, C., & Purnama, A. (2015). Peran Website Pemerintah Kota Manado Dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 19(3), 123272.
- Karkin, N., & Janssen, M. (2014). Evaluating websites from a public value perspective: A review of Turkish local government websites. *International Journal of Information Management*, 34(3), 351–363. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.11.004>

- Kesswani, N., & Kumar, S. (2016). Accessibility analysis of websites of educational institutions. *Perspectives in Science*, 8, 210–212. <https://doi.org/10.1016/j.pisc.2016.04.031>
- Kondoro, A., & Mtebe, J. (2017). Accessibility and Usability of Government Websites in Tanzania. *The African Journal of Information Systems*, 9(4), 262. <http://196.44.162.10:8080/xmlui/handle/20.500.11810/4573>
- Kurniawan, F., Rakhmawati, N. A., Abadi, A. N., Zuhri, M., & Sugiyanto, W. T. (2017). Indonesia local government information completeness on the web. *Procedia Computer Science*, 124, 21–28. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.125>
- Masyhur, F. (2014). Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Pekommas*, 17(1), 9–14. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=266814&val=6557&title=Knerja>
- Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia Menggo, S., Rosdiana Su, Y., & Taopan, R. A. (2022). Pelatihan Pembuatan Website Desa Wisata di Desa Wisata Meler, Kabupaten Manggarai NTT. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 61), 108–115.
- Riki Afriansyah. (2020). Pembuatan Portal Website Sekolah Sma Negeri 1 Sungailiat Sebagai Media Informasi. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 154–160. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4413>
- Rinaldi, H., & Yuardani, A. M. (2015). Analisis Peluang Transformasi “E-Government” menjadi “E-Democracy” melalui Website Resmi Pemerintah Daerah. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 103. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1201>
- Schuppan, T. (2009). E-Government in developing countries: Experiences from sub-Saharan Africa. *Government Information Quarterly*, 26(1), 118–127. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.01.006>
- Sherafat, A., & Davoodi, S. M. R. (2018). Designing a new model for organizational websites evaluation. *International Journal of Information Science and Management*, 16(1), 49–69.
- Veeramootoo, N., Nunkoo, R., & Dwivedi, Y. K. (2018). What determines success of an e-government service? Validation of an integrative model of e-filing continuance usage. *Government Information Quarterly*, 35(2), 161–174. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.03.004>
- Venkatesh, V., Hoehle, H., & Aljafari, R. (2014). A usability evaluation of the Obamacare website. *Government Information Quarterly*, 31(4), 669–680. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.07.003>
- Verkijika, S. F., & De Wet, L. (2018). A usability assessment of e-government websites in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Information Management*, 39(September 2017), 20–29. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.11.003>
- Wahid, F. (2008). Evaluating Focus and Quality of Indonesian E-Government Websites. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 2008(Snati)*, 39–43.

- Wanti, L. P., Romadloni, A., Ikhtiagung, G. N., & Adi, N. W. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengembangan Desa Wisata Widarapayung Wetan melalui Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). 6(1), 128–135.
- Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2018 (Sentika), 23–24. <https://fti.uajy.ac.id/sentika/publikasi/makalah/2018/40.pdf>